



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

KEMANDIRIAN FISKAL SEBAGAI PILAR PEMERATAAN EKONOMI NASIONAL

Fauzan Lazuardi Ramadhan
Analisis Legislatif Ahli Pertama
fauzan.ramadhan@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kemandirian fiskal merupakan sebuah keharusan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan di daerah. Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memisahkan urusan keuangan pusat dan daerah secara jelas. Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, menegaskan masih banyak pemerintah daerah (pemda) menghadapi tantangan, seperti tingginya ketergantungan terhadap transfer ke daerah (TKD); rendahnya kemandirian fiskal daerah; serta belanja daerah yang didominasi belanja rutin.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyampaikan bahwa hanya 15 dari 508 kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal yang kuat. Artinya, mayoritas pemda masih bergantung pada TKD untuk membiayai program dan belanja operasionalnya. Padahal, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyampaikan adanya penurunan anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar 29,34 persen dari tahun 2025.

Wakil Menkeu, Suahasil Nazara, menepis anggapan bahwa penurunan TKD karena adanya resentralisasi fiskal. Menurutnya, hal itu terjadi karenakan meningkatnya belanja pemerintah pusat yang langsung menasar masyarakat di daerah, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan program keluarga harapan (PKH). Meski TKD turun, belanja pemerintah pusat yang langsung menasar masyarakat di daerah dalam RAPBN 2026 naik menjadi Rp1.376,9 triliun dibanding 2025. Strategi ini bertujuan agar program prioritas nasional lebih merata di seluruh wilayah.

Namun, Ekonom Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Vid Adrison, menyampaikan penurunan TKD akan berdampak signifikan pada penerimaan daerah. Pasalnya, TKD menyumbang sekitar 83 persen dari anggaran daerah. Menurutnya, program prioritas pemerintah di daerah tidak selalu memberi nilai tambah bagi perputaran ekonomi, sehingga berpotensi mendorong kenaikan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Senada dengan itu, Dewan Guru Besar FEB UI, Mohamad Ikhsan, menekankan tanpa strategi yang tepat, program populis pemerintah pusat saat ini justru mempersempit ruang fiskal karena pembiayaan besar tidak otomatis menambah penerimaan jangka panjang.

Karena itu, perencanaan dan penataan keuangan daerah yang lebih baik menjadi sebuah prioritas. Pemda dituntut lebih inovatif dalam menggali sumber pendapatan sendiri guna menurunkan ketergantungan pada pusat. Beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain, *pertama*, pemetaan potensi dan keunggulan daerah. Bappenas dapat melakukan identifikasi sektor-sektor yang memiliki prospek yang dapat dikembangkan untuk menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Kebijakan yang berbasis kekhasan daerah menjadi solusi yang tepat dibandingkan pendekatan keseragaman untuk meningkatkan sektor prioritas daerah.

Kedua, peningkatan sinergi antara pusat dan daerah. Sinergi tersebut terdiri dari sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan serta belanja pusat-daerah diharapkan dapat terus meningkat melalui penggunaan TKD yang lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

Ketiga, menggeser peran APBN dari pembayar menjadi penggerak dan instrumen *de-risking*. Managing Director & Senior Partner Boston Consulting Group (BCG), Lenita Tobing, mengatakan perlu adanya pengalihan belanja subsidi konsumtif ke belanja produktif. Selain hal tersebut, tata kelola APBN berbasis *outcome* dengan monitoring yang ketat akan menjadikan APBN sebagai katalis pertumbuhan dan memberi *multiplier effect* untuk penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi di daerah.

Keempat, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta peningkatan investasi daerah. Optimalisasi kinerja BUMD dapat menciptakan sumber pendapatan baru bagi daerah melalui keuntungan dari berbagai sektor usaha. Di samping itu, perlu penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat investor dalam berkolaborasi untuk pembangunan daerah.

Pada akhirnya, kemandirian fiskal menjadi cita-cita bersama agar pembangunan tidak sepenuhnya membebani APBN tetapi bisa saling bekerjasama untuk mewujudkan keadilan yang merata. Melalui strategi yang tepat diharapkan pengelolaan keuangan dapat memberi efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

Atensi DPR

Kemandirian fiskal daerah menjadi sebuah keharusan agar mengurangi beban APBN dalam membiayai pembangunan di daerah sehingga menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Penurunan TKD sebesar 29,34 persen dari pemerintah pusat perlu diimbangi dengan strategi yang konkret, agar tidak menjadi sebuah permasalahan di daerah. Menanggapi hal tersebut, DPR RI melalui Komisi XI dapat melakukan pengawasan terhadap implementasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan aspirasi dan kendala yang dihadapi terutama oleh pemda. Selain hal tersebut, Komisi XI DPR RI dapat mendorong Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemetaan secara kewilayahan belanja pemerintah pusat yang dilakukan di daerah agar dapat disinergikan dengan pembiayaan yang dilakukan oleh pemda, sehingga belanja yang dilakukan dapat tepat sasaran bagi masyarakat.

Sumber

antaranews.com, 2 September 2025;
kontan.co.id, 22 dan 26 Agustus; 2 September 2025;
koran-jakarta.com, 2 September 2025;
merdeka.com, 2 September 2025; dan
news.ddtc.co.id, 25 Agustus 2025.



EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah.
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*